

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam penggunaannya, bahasa mencerminkan budaya yang melatarbelakangi penuturnya. Agar tidak terjadi kegagalan pragmatik dalam komunikasi, diperlukan pemahaman terhadap latar budaya lawan tutur. Hal ini terlihat dalam konsep *langue* dan *parole* yang dicetuskan oleh Saussure (Oktavianus, 2006). *Langue* adalah produk sosial yang tersimpan dalam pikiran penutur dan *parole* merupakan ujaran yang diproduksi oleh penutur. Artinya adalah pengkajian terhadap *langue* diperlukan untuk memahami *parole*. Pemahaman terhadap konteks dalam linguistik salah satunya dengan menggunakan analisis wacana kritis.

Analisis wacana kritis (AWK) merupakan salah satu kajian bahasa yang dapat digunakan untuk mengkaji secara mendalam hubungan wacana dengan konteks. Konteks ini tentunya digunakan untuk tujuan dan praktek tertentu terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan, dominasi atau ketidaksetaraan kekuasaan. Norman Fairclough sebagai salah satu tokoh AWK memandang bahwa fenomena komunikasi banyak dipenuhi oleh kesenjangan, ketidakseimbangan, rekayasa, dan ketidakadilan dalam komunikasi, politik, kekuasaan dan budaya.

Fairclough (1995) mengemukakan bahwa analisis wacana kritis seharusnya mencakup analisis sosial praktis suatu teks atau sosial budaya yang ada di mana aktivitas komunikatif tersebut berlangsung. Fairclough menemukan hubungan faktor ekonomi, politik dan ideologi yang melatarbelakangi struktur dan

bentuk wacana, sebagaimana Asmara (2016) menyebut ideologi dan kekuasaan tercermin dalam pemakaian kosa kata, kalimat, dan struktur wacana.

Sejalan dengan Fairclough, Habermas (Darma, 2009) menyatakan bahwa AWK bertujuan untuk membantu menganalisis dan memahami permasalahan sosial dalam hubungannya dengan ideologi dan kekuasaan yang terkandung dalam teks atau wacana. Van Dijk (Deborah Schiffrin, Deborah Tannen, 2001) juga mendefinisikan AWK sebagai jenis penelitian analisis wacana yang biasanya mempelajari cara penyalahgunaan, dominasi, dan ketidaksetaraan kekuatan sosial diberlakukan, direproduksi, dan ditentang oleh teks dan pembicaraan dalam konteks sosial dan politik. Melalui penelitian seperti itu, AWK mengambil posisi eksplisit, dan dengan demikian ingin memahami, mengekspos, dan akhirnya melawan ketidaksetaraan sosial. AWK menurut Van Dijk (1997) adalah struktur linguistik digunakan untuk menyistematiskan, mentransformasikan, dan mengaburkan analisis realitas; mengatur ide dan perilaku orang lain; dan menggolong-golongkan masyarakat. Demi tercapainya tujuan ini, AWK menggunakan unsur ejaan, gramatika, dan unsur tekstual sebagai bahan analisis.

Dengan demikian, menganalisis kata, frasa, kalimat, dan teks yang dihasilkan oleh seseorang dapat mengungkap persoalan-persoalan yang lebih besar dan mendasar. AWK sangat relevan digunakan untuk menganalisis fenomena bahasa yang penuh dengan kesenjangan, yakni adanya ketidaksetaraan relasi antarpartisipan, seperti komunikasi dalam politik, relasi antara atasan-bawahan, komunikasi dalam wacana media massa, serta relasi antara laki-laki dan perempuan dalam politik gender. Meskipun ada banyak aliran dalam paradigma ini, semuanya memandang bahwa bahasa bukan merupakan medium yang netral

dari ideologi, kepentingan dan jejaring kekuasaan. Karena itu, analisis wacana kritis perlu dikembangkan dan digunakan sebagai piranti untuk membongkar kepentingan, ideologi, dan praktek kekuasaan dalam kegiatan berbahasa dan berwacana.

Membongkar berbagai kepentingan dan praktek kekuasaan dapat diungkap dengan teori pergerakan wacana yang disebut dengan teori BREAK sebagai salah satu teori dalam AWK. BREAK merupakan akronim dari Basis wacana, Relasi wacana, Ekuilibrium wacana, Aktualisasi wacana, dan Keberlanjutan wacana. Teori ini adalah produk pengembangan dari kerangka berpikir (frame) E-135 karya Sawirman (2005). Frame E-135 merupakan filsafat yang melandasi teori-teori linguistik lintas batas (Sawirman, 2014).

Fenomena tarik menarik kepentingan dan praktek kekuasaan terjadi di berbagai sektor baik itu yang berhubungan dengan kepentingan elit politik maupun yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sektor yang paling menarik dan penuh dengan praktek kekuasaan adalah sektor infrastruktur. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek yang diutamakan pemerintah saat ini untuk meningkatkan pembangunan di Indonesia. Berbagai macam pembangunan dilakukan demi menggenjot roda perekonomian Indonesia seperti pembangunan bandara, pelabuhan, terminal, jalan tol, dan sarana publik lainnya. Dalam Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2005 menyatakan bahwa Infrastruktur transportasi yang terdiri dari pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel, stasiun kereta api. Infrastruktur jalan terdiri atas jalan tol dan jembatan tol. Infrastruktur pengairan terdiri atas saluran pembawa air baku. Infrastruktur air minum terdiri atas bangunan pengambilan air baku,

jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan instalasi pengolahan air minum. Infrastruktur air limbah terdiri atas instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang terdiri dari pengangkut dan tempat pembuangan (Presiden Republik Indonesia, 2005).

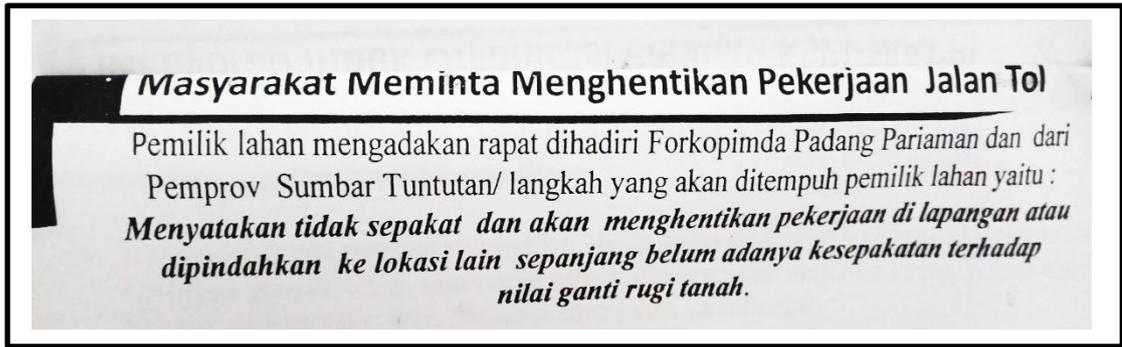
Salah satu pembangunan infrastruktur yang paling banyak menyita perhatian publik adalah jalan tol. Berdasarkan Permen PUPR NO 10/PRT/M/2018, jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol (Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, 2018). Jalan tol memiliki dampak positif dan negatif. Menurut Permen PUPR NO 11/PRT/M/2010, dampak positif dan negatif, di antaranya mempercepat waktu tempuh, memperlancar waktu tempuh, naiknya harga tanah di sekitar pembangunan jalan tol, mengurangi kepadatan penduduk. Selain itu, dampak negatif dari pembangunan jalan tol adalah berkurangnya lahan produktif pertanian, adanya pengurangan luasan lahan terbuka hijau, dan rusaknya lingkungan hidup di sekitar pembangunan infrastruktur jalan (Menteri Pekerjaan Umum, 2010).

Di Sumatra Barat, pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru terdiri atas lima ruas, yaitu Padang-Sicincin, Sicincin-Payakumbuh, Payakumbuh-Pangkalan-Pangkalan-Bangkinang, dan Bangkinang-Pekanbaru. Ruas tol Padang-Bukittinggi-Pekanbaru akan terhubung dengan Tol Trans Sumatera yang merupakan bagian dari Asean Highway. Tol ini akan memperpendek waktu tempuh dari antara 8-10 jam menjadi 3-4 jam (Metroandalas.co.id, 2017).

Pembangunan infrastruktur transportasi jalan khususnya jalan tol di Sumatra Barat mengalami berbagai kendala. Tantangan tersebut disebabkan antara lain oleh kebijakan politik dari pemangku kepentingan (pemerintah daerah) yang relatif sulit berkoordinasi dengan pemerintah pusat terlebih dengan masyarakat terutama dalam masalah pembebasan lahan. Pada sisi lain, pembangunan infrastruktur transportasi yang sama di wilayah lain relatif berhasil dilaksanakan oleh pemerintah misalnya di Aceh, Riau, dan daerah lain di pulau Sumatra lainnya.

Berkenaan dengan permasalahan ini, berbagai wacana muncul dalam pemberitaan mengenai pembangunan tol Padang-Pekanbaru khususnya ruas Padang-Sicincin (Pacin). Penggunaan bahasa terutama pada teks-teks berita *online* dalam wacana ini perlu dianalisis melalui analisis wacana kritis karena terdapat ketidaksepahaman antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat terdampak pembangunan tol. Ketidaksepahaman ini tergambar dalam teks yang diwacanakan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Akar permasalahan ini perlu dicarikan solusinya agar terjalin kesepahaman wacana antara pemerintah dan masyarakat sehingga tercapainya sinergitas yang saling menguntungkan antara pemerintah dan masyarakat.

Berikut ini merupakan salah satu contoh teks berita yang disampaikan oleh masyarakat terdampak tol Pacin yang diambil dari Laporan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat tentang Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Ruas Padang-Sicincin.



Gambar 1.1
 Contoh wacana masyarakat

Berdasarkan sistem transivitas Halliday (STH), verba *meminta* termasuk dalam verba yang menunjukkan aktivitas yang berhubungan dengan informasi. Informasi yang didapatkan dari verba *meminta* adalah masyarakat menyatakan ketidaksepakatan atas nilai ganti rugi atas tanah mereka. Dengan demikian, teks di atas dikategorikan dalam proses verbal. Proses verbal adalah proses yang menunjukkan kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan informasi (Halliday, 1994). Aktor dalam proses verbal disebut sebagai pembicara yang dalam hal ini adalah *masyarakat* dan yang menjadi perkataan adalah *menghentikan pekerjaan jalan tol*. Proses verbal di atas dapat diuraikan sebagai berikut.

Masyarakat	Meminta	(kepada pemerintah)	Menghentikan pekerjaan jalan tol
Pembicara	Proses	Penerima	Perkataan

Secara sintaksis, teks di atas ditulis dalam bentuk aktif. Penggunaan bentuk aktif menunjukkan penekanan peran subjek yaitu masyarakat. Di sisi lain, terdapat pelepasan objek yang terjadi pada teks berita di atas. Dapat dipahami bahwa objek yang dimaksudkan di sini adalah frasa *kepada pemerintah*. Pelepasan ini dimaksudkan untuk sebagai menghilangkan peran negatif pemerintah dalam konflik dengan masyarakat.

Wacana masyarakat meminta menghentikan pekerjaan jalan tol Pacin sepanjang 4,2 km ini disebabkan permasalahan pembebasan lahan. Masyarakat tidak terima dengan harga yang ditentukan oleh tim penilai. Tim penilai yang dimaksudkan di sini adalah perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah (Presiden Republik Indonesia, 2012). Tim penilai memutuskan harga ganti rugi lahan berkisar antara Rp. 42.000 – Rp. 286.000 per meter persegi. Nominal ganti rugi ini disesuaikan dengan letak lahan. Jika letak lahan dianggap strategis, maka harganya lebih mahal dan begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, seharusnya tidak ada keraguan bagi masyarakat terhadap penilaian Tim penilai terkait permasalahan harga ganti rugi. tetapi faktanya penetapan harga yang sudah dilakukan oleh Tim penilai menjadi polemik di masyarakat khususnya masyarakat yang tanahnya terdampak pembangunan jalan tol. Harga yang ditetapkan tersebut jauh dari harapan masyarakat yang dalam perhitungan menilai tanah mereka layak dihargai Rp. 600.000 – Rp. 2.000.000,- per meternya (Harian Haluan, 2018).

Penelitian ini menganalisis aspek kebahasaan yang didasarkan pada teks berita *online* dan pergerakan wacana tol Pacin melalui teori BREAK. Penelitian ini penting dilakukan didasarkan pada beberapa alasan, di antaranya: *pertama*, masih banyaknya fenomena bahasa yang belum tersentuh salah satunya adalah bidang infrastruktur; *kedua*, teks dalam pandangan wacana kritis merupakan realitas yang tidak bebas nilai. Teks dimanfaatkan untuk menanamkan ideologi, kepentingan, dan ide untuk memperlihatkan hegemoni pihak yang berkuasa dan

memarjinalkan pihak yang lemah. *Ketiga*, bahasa sebagai bagian dari budaya melindungi kebudayaan itu sendiri. Ketika kebudayaan berada dalam posisi yang sulit, bahasa menjadi aktor yang menyelamatkan kebudayaan itu. Beberapa faktor ini dijadikan landasan untuk menemukan solusi melalui aspek kebahasaan bagi pemangku kepentingan baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Solusi ini diperlukan demi tercapainya sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat agar realisasi pembangunan jalan tol dapat tercapai demi kesejahteraan masyarakat. Hasil dari penelitian ini juga dimungkinkan direkomendasikan kepada pemangku kepentingan sebagai salah satu solusi pemecahan masalah karena proses pembangunan jalan tol ini masih berlangsung hingga saat penelitian ini dilakukan.

1.2. Batasan Masalah

Wacana tidak hanya serangkaian kata dalam teks namun lebih kepada sebuah gagasan yang dibentuk dalam konteks tertentu sehingga mempengaruhi cara berpikir dan bertindak terutama yang mengandung kepentingan tertentu. Dalam permasalahan pembangunan jalan tol, wacana memiliki peran yang sangat penting dalam mengekspresikan gagasan dan pengalaman penuturnya mengenai kelanjutan pembangunan ini. Untuk menghindari penelitian yang terlalu luas, penelitian ini dibatasi pada analisis pergerakan wacana yang terefleksi dalam teks berita *online* mengenai pembangunan jalan tol Pacin. Analisis wacana kritis digunakan sebagai landasan teori dalam menelaah teks tentang pembangunan jalan tol ini.

1.3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berfungsi sebagai pemandu penulis dalam mengungkapkan masalah yang diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam.

Untuk itu, dalam penelitian ini dirumuskan masalah yang dianalisis dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah konfigurasi dan tipe pergerakan wacana pembangunan tol Padang-Sicincin dalam basis wacana?
2. Bagaimanakah relasi antarwacana yang terefleksi dalam wacana pembangunan tol Padang-Sicincin?
3. Bagaimanakah rentang keseimbangan wacana pembangunan tol Padang-Sicincin?
4. Apakah perilaku wacana pembangunan tol Padang-Sicincin dan bagaimanakah efeknya terhadap masyarakat?
5. Bagaimanakah keberlanjutan wacana pembangunan tol Padang-Sicincin di masa yang akan datang?

1.4. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan. Setiap tujuan penelitian berkaitan dengan rumusan masalah (Sugiyono, 2017). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan pergerakan wacana yang terdapat pada teks wacana pembangunan jalan tol Pacin. Agar tujuan penelitian ini tercapai, maka tujuan penelitian ini diformulasikan menjadi beberapa bagian, di antaranya:

1. Menemukan, mendeskripsikan, menganalisis konfigurasi dan tipe pergerakan wacana pembangunan tol Padang-Sicincin dalam basis wacana.
2. Mendeskripsikan relasi antarwacana yang terefleksi dalam wacana pembangunan tol Padang-Sicincin.

3. Menentukan rentang keseimbangan wacana pembangunan tol Padang-Sicincin.
4. Menjelaskan perilaku wacana pembangunan tol Padang-Sicincin dan menemukan efeknya terhadap masyarakat.
5. Memprediksikan keberlanjutan wacana pembangunan tol Padang-Sicincin di masa yang akan datang.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berhubungan dengan penelitian ini khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Manfaat pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu bersifat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan pihak terkait tentang pengaruh penggunaan bahasa dalam wacana tol Pacin sebagai salah satu solusi pemecahan masalah dan dapat mensinergikan kajian linguistik dengan bidang ilmu lain terutama ilmu komunikasi dan hukum.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk mengetahui berbagai macam wacana yang terdapat dalam permasalahan pembangunan tol Pacin; sebagai salah satu solusi bagi pemangku kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan jalan tol Pacin; dan terakhir sebagai tinjauan pustaka dan bahan penelitian-penelitian selanjutnya.